

BAB II

GAMBARAN UMUM ORDE BARU DAN IWAN FALS

2.1. Gambaran Umum Orde Baru

2.1.1. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan orde baru yang dimulai pada akhir tahun 1960 menandai sebuah era yang penuh modernisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Rezim ini dikenal dengan kebijakannya yang kuat dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, namun juga dengan pendekatannya yang otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemajuan pembangunan berhasil dicapai, kebebasan sipil dan kontrol ketat terhadap media serta oposisi politik dilakukan untuk memastikan stabilitas negara tercapai. Orde baru membawa perubahan signifikan dalam ranah sosial-politik di Indonesia, termasuk meninggalkan catatan kelam yang terus dibahas hingga hari ini.

Pemberian mandat kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966 atas perintah Presiden Soekarno menjadi awal mula lahirnya orde Baru. Pada masa kepemimpinan Soekarno, terdapat kekacauan akibat Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang menimbulkan demonstrasi oleh mahasiswa yang dikoordinasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Demonstrasi tersebut menciptakan tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya serta menolak adanya neo-PKI, pencabutan kebijakan ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga oleh Kabinet Dwikora, dan pembersihan kabinet dari simpatisan

PKI. Aksi mahasiswa tetap berlangsung karena Soekarno merombak Kabinet Dwikora tanpa memenuhi tuntutan dari KAMI, yang menyebabkan keadaan semakin tidak stabil. Demonstrasi yang dilakukan oleh KAMI saat pelantikan penyempurnaan Kabinet Dwikora menyebabkan mahasiswa anggota KAMI tewas tertembak. Pembubaran KAMI dan pelarangan demonstrasi oleh mahasiswa akhirnya ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 26 Februari 1966.

Ketidakstabilan di Jakarta ini mengakibatkan Presiden Soekarno mengumpulkan para menteri pada tanggal 11 Maret 1966 dalam sidang Kabinet yang Disempurnakan. Pada tanggal tersebut Presiden Soekarno memberi mandat kekuasaan kepada Jenderal Soeharto (yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar) berisikan empat mandat untuk Jenderal Soeharto antara lain pengamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya, kewajiban melaporkan semua tindakan kepada Presiden, pengamanan Presiden beserta keluarganya, dan pelestarian ajaran Bung Karno.

Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang ditunjukan untuk Jenderal Soeharto disalahartikan sebagai pemindahan kekuasaan sehingga terdapat beberapa aturan yang diubah. Jenderal Soeharto membubarkan PKI beserta organisasi yang membawahnya dan melarang PKI atas nama Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1966. Saat melaksanakan tugasnya, Jenderal Soeharto turut menangkap 15 menteri dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan yang terindikasi terlibat dalam G30S PKI. Melemahnya kepemimpinan Bung Karno saat itu menjadikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden dan mencabut

Ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yakni pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup.

Mulainya orde baru ditandai dengan pembentukan Kabinet Ampera yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto. Agar dapat memenuhi tiga tuntutan rakyat atau Tritura, terdapat program kerja Caturkarya Kabinet Ampera yang meliputi memperbaiki kehidupan rakyat melalui sandang dan pangan, melaksanakan pemilu sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 pada tanggal 5 Juli 1968, melaksanakan politik bebas dan aktif demi kepentingan nasional, serta melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme. Kepemimpinan Soekarno jatuh sepenuhnya pada tahun 1967, menjadikan Soeharto sebagai presiden melalui sidang istimewa MPRS 7—12 Maret 1967.

2.1.2. Karakteristik Pemerintahan Orde Baru

Keberjalanan pemerintahan Soeharto resmi dimulai pada Maret 1968 dengan julukan orde baru. Era orde baru mempunyai visi untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pemerintahan orde lama dirasa melenceng dari Pancasila sehingga dasar-dasar tersebut perlu dikembalikan dalam bermasyarakat. Pemerintahan orde baru menganggap komunisme sebagai akar dari permasalahan kehidupan berbangsa sehingga diterapkan pelarangan atas paham komunisme dan hal-hal yang berbau marxisme dan komunisme. Maka dari itu, orde baru melarang adanya penyebaran paham marxisme dan komunisme melalui beberapa kebijakan.

Pemerintahan orde baru berlangsung saat keadaan negara belum stabil. Dalam upayanya untuk mengembalikan keadaan negara, pemerintahan Soeharto menata kembali kebijakan terutama dalam bidang ekonomi dan politik seperti:

1. Orde baru memberlakukan politik bebas aktif sebagai kebijakan politik luar negeri dan fokus terhadap pembangunan ekonomi. Adanya politik bebas aktif membuka kerjasama ekonomi dengan negara lain melalui penanaman modal asing hingga pemberian dana bantuan.
2. Menggunakan Konsep Trilogi Pembangunan (pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional) melalui beberapa program kerja seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Swasembada Pangan.
3. Penyederhanaan partai politik menjadi 3 yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya berdasarkan pada sidang MPR tahun 1973 yang kemudian disahkan dalam UU No. 3 Tahun 1975.

Pemerintahan orde baru melaksanakan pembangunan dengan cara teknokratis sehingga partisipasi masyarakat minim agar pelaksanaan pembangunan yang berlangsung berjalan sebagaimana mestinya (Gaffar, 1999). Orde Baru memakai tiga pilar utama yakni militer, teknokrat, dan birokrat (Suwirta, 2018). Dengan pembatasan tersebut, konflik yang ada di dalam negara minim sehingga rencana orde baru dapat dilaksanakan.

Pemerintahan orde baru memberlakukan sistem kemitraan politik dan pembagian peran kolaborasi antara sipil dengan militer untuk mengembalikan tatanan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan diorganisasi secara vertikal dengan ABRI memegang peran penting dalam keberjalanan pemerintahan Orde Baru dalam aspek sosial-politik. Hal tersebut menjadikan kepemimpinan Soeharto tergolong sebagai *repressive-developmental regime* (Feith, 1981). *Repressive developmental regime* adalah negara yang kuat terlibat dalam memfasilitasi pertumbuhan kapitalis yang cepat di antaranya industrialisasi di era korporasi transnasional namun pihak yang berkuasa berusaha memonopoli kekuasaan dan tidak memberikan ruang bagi oposisi atau kekuatan lain yang dapat menantang otoritas mereka. Bentuk ideologi dari rezim tersebut antara lain adalah developmentalis-teknokratis, nasionalistis, dan militeristik. Salah satu contoh bagaimana militer mempunyai peran penting dalam pemerintahan adalah setiap pers harus memiliki dua izin yang diperoleh yaitu Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dan lembaga keamanan militer KOPKA-MITB (Hill, 2011). Ideologi tersebut sejalan dengan keberjalanan pemerintahan Soeharto melakukan rekayasa sosial dengan strategi tingkat wacana melalui isolasi politik dan pembangunanisme juga praktik mengendalikan masyarakat melalui birokrasi, militer, dan Golkar dengan tujuan masyarakat minim untuk mengkritik pemerintah.

Orde Baru menerapkan negara birokrasi di mana segelintir elite menguasai pengambilan keputusan suatu negara. Pemerintahan orde baru bersifat kapitalistik

dengan orientasi pada pertumbuhan. Sistem ini dikenal sebagai model *bureaucratic authoritarian with limited plurality*, yang berarti birokrat (sipil dan militer) memiliki peran dominan dan cenderung otoriter, meskipun ada sedikit pluralisme (Dwight Marth dalam Anderson dan Kahin, 1982). Sistem rekrutmen dalam lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, dan lainnya tertutup, memungkinkan praktik nepotisme terjadi.

Fungsi legislatif pada masa pemerintahan orde baru tidak berjalan dengan semestinya. Dominasi Golongan Karya (Golkar) dalam tubuh legislatif membuat pemerintahan orde baru tidak mempunyai oposisi yang kuat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan-akan hanya sekadar “stempel karet” karena tidak adanya kontrol oposisi terhadap pemerintah sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan efektif.

Pembagian kekuasaan pusat dan daerah yang diberlakukan pada masa orde baru adalah sentralisasi, yakni pemerintah pusat mempunyai pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan daerah. Pada tahun 1990-an, kebijakan untuk menjual semua aset yang dimiliki oleh negara untuk mendapat keuntungan sering kali mengesampingkan hak-hak publik dan dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan tersebut. Pada akhir tahun 1980-an, sektor swasta dapat berpartisipasi dalam menentukan arah dan model pembangunan. Peran swasta kemudian menjadi celah untuk mengkomersialisasi ruang, yang dilakukan dengan penggusuran rumah penduduk dan sektor ekonomi kecil untuk digunakan sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran.

2.1.3. Malapetaka 15 Januari 1974: Awal Mula Pembatasan Pers dan

Kebebasan Sipil

Pada awal kepemimpinan orde baru, kondisi Indonesia terhitung jauh dari kata stabil. Kondisi sosial-politik pada awal tahun 1970 mengalami kekacauan yang disebabkan oleh banyaknya korupsi yang terjadi, anggaran pendidikan yang kurang, dan pembangunan ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat menjadi masalah besar (Jazimah, 2013). Kebijakan yang diambil oleh orde baru dirasa tidak menyelesaikan masalah yang ada dan cenderung membuat keadaan negara memburuk. Munculah gerakan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah. Pada tahun 1970, pemerintah menganggapi aksi mahasiswa dengan toleran namun kondisi politik Indonesia tahun 1973 memanas sehingga aksi demonstrasi mahasiswa mulai serius ditanggapi.

Pembangunan merupakan fokus utama pemerintahan orde baru dalam mengembalikan pertumbuhan negara. Keberjalanan pembangunan orde baru salah satunya dilakukan dengan kerja sama ekonomi luar negeri seperti penanaman modal asing dengan tujuan untuk memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat Indonesia tanpa mengeluarkan biaya proyek yang besar. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kontribusi penting dalam keberjalanan pembangunan ekonomi melalui Repelita I (1969—1974). Jepang melalui Official Development Assistance (ODA) memberikan pinjaman terhadap Indonesia untuk melaksanakan Repelita I sebanyak 10,8 miliar yen untuk menutupi defisit anggaran. Bagi Jepang, Indonesia merupakan sasaran yang vital karena Indonesia merupakan salah satu

pemasok *liquid natural gas* terbesar Jepang, sumber daya alam yang kaya, dan upah kerja yang murah.

Kerjasama penanaman modal asing antara Jepang dan Indonesia menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Masyarakat terutama mahasiswa merasa bahwa program ini hanya akan menambah hutang negara saja. Selain itu, mahasiswa berpendapat bahwa pembangunan yang berlandaskan pada bantuan asing dapat menghasilkan pemerasan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial (Jazimah, 2013).

Mahasiswa dari berbagai universitas melakukan diskusi, memberikan tuntutan terhadap pemerintah, hingga melakukan pertemuan tertutup untuk melakukan gerakan sebagai bentuk ketidaksetujuan kerjasama tersebut. Kemarahan mahasiswa mulai memuncak pada 9 Januari 1974 yang ditandai dengan penentangan mahasiswa terhadap asisten pribadi (Aspri) Presiden namun Aspri menyerang balik mahasiswa dengan menuduh mahasiswa ditunggangi oleh kekuatan luar anti-Soeharto. Pada tanggal 11 Januari 1974, Presiden Soeharto menerima delegasi mahasiswa untuk menyampaikan kritiknya namun pertemuan tersebut tidak menemukan hasil.

Puncak aksi penolakan investasi Jepang di Indonesia pada 15—16 Januari 1974 dimulai dengan penggerakan aksi massa mahasiswa ke Monas dan berakhir dengan vandalisme oleh aksi massa. Peristiwa 15 Januari 1974 menelan korban sebanyak 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Akibat peristiwa Malari, terdapat beberapa pemberlakuan baru seperti:

1. Pemerintah orde baru mengeluarkan peraturan tegas seperti adanya pembatasan jam malam di Jakarta 18.00—06.00, penjagaan ketat aktivitas mahasiswa Universitas Indonesia (sebagai basis massa) oleh ABRI (yang kemudian keduanya dicabut pada 21 Januari 1974), penangkapan 45 aksi massa yang dianggap memprovokasi gerakan, dan penutupan beberapa Koran (Nusantara, Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, dan Ekspres) oleh pemerintah karena dianggap melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban umum;
2. Pemerintah membatasi kegiatan dewan mahasiswa di dalam kampus dengan mengontrol mahasiswa lewat pimpinan perguruan tinggi (sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemerintah No. 028/1974). Lewat peraturan tersebut, mahasiswa perlu mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan. Pers mahasiswa diawasi oleh Dewan Penerangan dan birokrat kampus. Kegiatan demonstrasi juga dilarang dan jika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi akan berhadapan dengan ABRI.

2.1.4. Kondisi Keberjalanan Orde Baru Pasca Malari (1975—1998)

2.1.4.1. Depolitisasi dan Limitasi Kebebasan Pers

Orde baru mengalami perubahan yang signifikan terlebih dalam melancarkan pembangunanisme setelah Malari. Rezim orde baru melakukan segala cara untuk melancarkan pembangunanisme. Pemerintah orde baru melakukan depolitisasi hingga perenggutan hak asasi manusia dan kebebasan sipil agar stabilitas negara terjaga.

Orde baru menjalankan beberapa cara depolitisasi seperti penerapan massa mengambang (*floating mass*) yang berfungsi untuk menata dan menyederhanakan organisasi sosial-politik dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dibentuknya massa mengambang dilakukan oleh orde baru agar partisipasi masyarakat minim dalam pembangunan politik lokal dengan memberlakukan pelarangan atas pembentukan kepengurusan partai politik sehingga masyarakat menjadi apolitis (acuh terhadap politik) dan tidak terlibat dalam urusan politik (Marpaung, 2012). Selain itu, orde baru memberlakukan penerapan monoloyalitas terhadap Golongan Karya (Golkar) dalam lingkungan pegawai negeri atau pegawai instansi pemerintahan. Proses pelemahan kekuatan, pengaruh, atau kemampuan partai politik juga dilakukan orde baru dengan cara menyederhanakan partai politik dan mengontrol rekrutmen pemilihan ketua umum partai politik (Gaffar, 2006).

Pemerintah orde baru juga memperketat kritik terhadap rezim dan pengetatan terhadap pers. Pers tidak boleh menyiarkan sesuatu yang sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan. Topik pemberitaan tertentu seperti kritik terhadap pemerintahan, keluarga Soeharto, senior militer, dan sebagainya juga tidak dapat dipublikasi secara luas kecuali ada pers yang mengecam (Hill, 1995). Dalam mencegah kritik terhadap pemerintah, diterbitkanlah peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 bahwa setiap penerbitan pers perlu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari pemerintah (Imron dan Sariyatun, 2016).

2.1.4.2. Pembatasan Gerakan Mahasiswa dan Fenomena Penembak Misterius

Orde baru merupakan rezim yang sangat antikritik. Kebijakan yang dihasilkan orde baru seperti limitasi kebebasan seperti dan pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diperuntukan untuk membatasi kegiatan mahasiswa di kampus dan membendung gerakan politik. Semenjak peristiwa Malari, mahasiswa dilarang melakukan demonstrasi atau akan berhadapan dengan ABRI.

Mahasiswa dan aktivis pada saat itu tidak jarang dicekal oleh orde baru entah ditangkap, ditahan, atau dihilangkan. Peristiwa penangkapan dan penghilangan atas aktivis di era orde baru marak terjadi pada tahun 1997—1998. Banyak mahasiswa dan aktivis yang diculik dan tidak jelas keberadaannya hingga hari ini.

Pemerintah juga membentuk penembak misterius (petrus) dan menghilangkan siapa saja yang mengkritik pemerintah. Petrus atau penembakan misterius mulai ada pada tahun 1983 di Yogyakarta. Petrus digunakan untuk memberantas kriminalitas yang terjadi di kawasan pinggiran kota besar dan sudut kota kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah korban ditembak biasanya terdapat uang sepuluh ribu rupiah untuk biaya pemakaman yang dibutuhkan (Tempo, 2012).

Kejayaan orde baru yang menduduki kursi pemerintahan selama 32 tahun membawakan catatan kelam bagi Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme,

hingga kurangnya peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, menjadikan kebijakan yang dihasilkan semakin pro-pemerintah. Kebebasan sipil dan pers yang direnggut semakin membuat orde baru tidak mempunyai oposisi. Kontrol sosial oleh masyarakat sipil tidak berjalan dengan semestinya karena rezim membatasi partisipasi masyarakat

2.2. Gambaran Umum Iwan Fals

2.2.1. Latar Belakang Kehidupan Iwan Fals

Virgiawan Listanto atau kerap dikenal sebagai “Iwan Fals” merupakan salah satu musisi yang turut aktif melawan rezim orde baru. Iwan Fals lahir di Jakarta, 3 September 1961. Ayah Iwan Fals merupakan salah satu Kolonel Angkatan Darat yakni Kolonel Haryoso. Oleh karena itu, Iwan Fals tumbuh dalam keluarga yang menganut nilai-nilai militer.

Sebelum perjalanan karir musiknya dimulai, Iwan Fals memiliki ketertarikan dalam olahraga juga memiliki sejumlah prestasi dalam bidang tersebut. Iwan Fals pernah menduduki juara kedua dalam Karate Tingkat Nasional dan juara keempat beberapa majalah olahraga. Di tengah kecintaannya dengan olahraga, Iwan Fals lebih memilih musik untuk menghilangkan filosofi menang-kalah.

Iwan Fals memulai ketertarikannya dengan musik ketika 13 tahun dan memulai debut solo-nya pada tahun 1979. Tema yang diangkat oleh Iwan Fals seperti kritik sosial dan politik dalam lagunya menjadi peninggalan yang menginspirasi musisi dengan aliran musik protes. Hingga kini, Iwan Fals masih

terus produktif dalam berkarya dan menghasilkan total 37 album semasa karirnya. Karyanya masih dapat kita dengar terutama dalam demonstrasi tertentu.

2.2.2. Perjalanan Karir Iwan Fals

Kecintaan Iwan Fals terhadap musik membuat beliau menjadi musisi yang mempunyai peran besar dalam perkembangan musik protes. Iwan Fals memulai karir sebagai musisi saat beliau sedang di Bandung. Kegemarannya terhadap musik membawanya untuk mengamen pada saat duduk di bangku SMP. Lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals saat mengamen adalah lagu buatan beliau sendiri dengan lirik yang cenderung lucu.

Nama Iwan Fals pada dicetuskan oleh Engkus, seorang tukang bengkel motor di Bandung, karena beliau memainkan musik dengan fals. Pada saat itu pula karir Iwan Fals dimulai. Melalui Engkus, Iwan Fals kerap mengisi acara-acara pernikahan, hajatan, dsb (VINDES, 2023). Iwan Fals juga kerap mengisi mimbar mahasiswa setiap kali mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan aksi demonstrasi.

Sebelum Iwan Fals berada di bawah label Musica Studio, beliau sempat berada di label musik ABC Records bersama dengan band-nya Amburadul. Namun sangat disayangkan album dari band Amburadul-nya gagal. Iwan Fals kemudian ditawarkan untuk bergabung dengan Musica Studio dan menghasilkan 13 album di bawah label tersebut.

Sepanjang karirnya, Iwan Fals dikenal sebagai musisi yang berani karena liriknya yang eksplisit. Iwan Fals tumbuh di lingkungan kelas ekonomi menengah

dan berpengaruh terhadap sudut pandangnya pada orde baru. Pembawaan lirik lagu Iwan Fals yang bertemakan kritik dan cenderung eksplisit sudah dilakukan pada saat beliau duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau membuat lagu “Aku dan Sekolahku” sebagai bentuk kritik terhadap guru yang memberikan hukuman terhadap siswi yang menggunakan *lipstick* (Darmawan, 2020). Semangat beliau dalam melakukan perlawanan melalui musik berlanjut pada jenjang karirnya. Sepanjang karirnya, Iwan Fals kerap mengangkat musik dengan potret kehidupan yang ada di sekitarnya. Beberapa musiknya kerap mengambil tema yang dekat dengan masyarakat seperti kesenjangan sosial, isu korupsi, kolusi, nepotisme, hingga ketidakadilan sosial.

Karir Iwan Fals kemudian melesat setelah rekaman di Musica Studio dengan album pertama “Sarjana Muda” yang digarap oleh Willy Sumantri. Terdapat beberapa lagu dalam album pertamanya bersama Musica Studio terdiri dari sepuluh lagu dengan beberapa lagu antara lain “Guru Oemar Bakrie”, “Ambulans Zig-Zag”, “Puing”, “Sarjana Muda”, hingga “Yang Terlupakan”. Kata-kata yang digunakan dalam lagu Iwan Fals dalam lagunya cenderung cukup eksplisit. Dalam lagu “Ambulans Zig-Zag” misalnya, Iwan Fals menggambarkan bagaimana kesenjangan sosial terlihat dari perbedaan perlakuan pelayanan umum si nyonya kaya yang cepat ditangani dan supir helikopter yang harus menunggu lama pelayanan rumah sakit karena harus membayar pelayanan rumah sakit terlebih dahulu.

Lirik lagu Iwan Fals yang berani membuatnya harus beberapa kali dijegal oleh pemerintahan orde baru. Iwan Fals pernah dilarang untuk tampil pada konsernya di Kepulauan Riau pada tahun 1984. Iwan Fals diinterogasi oleh kepolisian selama

14 hari karena lagu yang dibawakan dirasa menyinggung pemerintah orde baru. Saat itu Iwan Fals membawakan lagu Demokrasi Nasi dan Mbak Tini. Dalam wawancaranya bersama majalah Rolling Stone pada Mei tahun 2017, Iwan Fals menceritakan bahwa lagu Mbak Tini merupakan kisah tentang penjual kopi yang sudah insyaf menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan suaminya yang berprofesi sebagai supir truk bernama Soeharto. Lagunya menceritakan tentang Soeharto yang diputus kerja dan tidak tahu keberadaannya (di dalam liriknya terdapat kalimat “*mati atau nikah lagi*”) dan Mbak Tini yang kembali menjadi PSK akibat keberadaan Soeharto yang tidak jelas. Konser Iwan Fals sempat disabotase oleh aparat dengan pemadaman listrik pada tahun 1980-an akibat menyindir pemerintah melalui lagunya (Nuri dalam Alexander). Pembatalan izin tur 100 kota yang akan diadakan di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahun 1989 (Tiga Rambu, 2013) untuk mempromosikan album *Mata Dewa* dan dicekal untuk tampil di TVRI (Aning S, dkk, 2007) menjadi bukti bahwa pemerintahan orde baru mencekal Iwan Fals karena dianggap “berbahaya” dan “mengganggu”.

Di masa pencekalan orde baru terhadap seniman yang mengkritik orde baru, termasuk pada Iwan Fals, dirinya menemukan ruang untuk menuangkan ekspresinya lewat seni di Bengkel Teater WS Rendra. Iwan Fals kemudian membentuk band “Swami” bersama Naniel, Sawung Djabo, Inisisri, Toto Tewel, Jerry, Tates, dan Cok Rampil sebagai bentuk ekspansi dalam berkarya (Tiga Rambu, 2013). Album pertama band Swami yakni *Swami I* diwarnai dengan kumpulan lagu yang bernafaskan kritik terhadap orde baru seperti “Bento” dan “Bongkar”. Iwan Fals bersama WS Rendra, Setiawan Djody, Sawung Djabu,

Inisisri, dan Jockie Surjoprajogo juga pernah membentuk band “Kantata Takwa” pada tahun 1990 dengan album pertama *Kantata Takwa* dan lagu-lagunya yang menggambarkan kondisi sosial-politik orde baru saat itu.

Iwan Fals mempunyai berbagai cara agar ruang berekspresinya tidak direnggut oleh pemerintah. Kolaborasi Iwan Fals dengan sejumlah seniman untuk membuat band menjadi tanda bahwa perlawanan akan selalu hidup meskipun hak sipil direnggut. Keberaniannya dalam menyampaikan kritik melalui karyanya menjadikannya sebagai salah satu musisi yang berpengaruh pada perkembangan musik protes masa orde baru hingga hari ini. Lirik dalam lagunya bahkan juga menjadi alat untuk membentuk identitas massa karena mengandung makna perlawanan di dalamnya. Dengan demikian, musik Iwan Fals menjadi menarik untuk dibahas.